

MATA UANG DIGITAL: PELUANG ATAU ANCAMAN? ANALISIS DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP KESTABILAN EKONOMI INDONESIA

Muhamad Hanifan Jaya Imansyah¹, Ramadhani Joys Figo², Syaifudin Akbari Abiludin³, Muchammad Zidan Dliyaulchaq⁴, Denny Oktavina Radianto⁵
mhanifan@student.ppns.ac.id¹, joysfigo29@student.ppns.ac.id², sakbari@student.ppns.ac.id³,
muchammadzidan@student.ppns.ac.id⁴, dennyokta@ppns.ac.id⁵
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

ABSTRAK

Pengenalan cryptocurrency telah mengubah lanskap finansial global, memperkenalkan paradigma baru dalam sistem pembayaran dan investasi. Fenomena ini mengundang perhatian besar dari kalangan akademisi, praktisi, dan regulator di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya telah menjadi topik pembahasan yang hangat dalam konteks ekonomi global, namun pemahaman terkait dampaknya terhadap ekonomi Indonesia masih terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dampak cryptocurrency terhadap kestabilan ekonomi Indonesia melalui pendekatan analisis yang komprehensif. Dalam mengidentifikasi peran cryptocurrency sebagai peluang atau ancaman bagi ekonomi Indonesia, penelitian ini mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, penelitian akan menginvestigasi tingkat adopsi dan penggunaan cryptocurrency di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kedua, penelitian akan menganalisis volatilitas harga cryptocurrency dalam konteks pasar keuangan Indonesia, dengan memperhatikan korelasi dan dampaknya terhadap instrumen keuangan tradisional seperti saham, obligasi, dan mata uang fiat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi regulasi dan kebijakan terhadap cryptocurrency dalam konteks Indonesia. Regulasi yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan keamanan bagi para pengguna cryptocurrency, namun demikian, ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan regulasi juga dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekosistem cryptocurrency yang sehat dan inovatif. digunakan jenis penelitian melalui penelitian pustaka atau library research serta penelitian Normatif dengan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang relevan dan bahan hukum lainnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis wacana, menganalisis literatur dan regulasi terkait untuk memahami dan mengevaluasi penerapan undang-undang dalam konteks yang relevan, penelitian ini akan menyajikan temuan yang mendalam tentang dampak cryptocurrency terhadap kestabilan ekonomi Indonesia. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi pengambil kebijakan, praktisi keuangan, dan akademisi untuk memahami lebih baik dinamika pasar mata uang digital serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengelola risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terkandung dalam fenomena cryptocurrency ini.

Kata Kunci : Cryptocurrency, Stabilitas Ekonomi, Indonesia.

ABSTRACT

The introduction of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, introducing a new paradigm in payment and investment systems. This phenomenon has garnered significant attention from academics, practitioners, and regulators worldwide, including in Indonesia. Digital currencies such as Bitcoin, Ethereum, and others have become hot topics in the global economic context, yet understanding their impacts on the Indonesian economy continues to evolve. This research aims to delve into the impact of cryptocurrency on the stability of the Indonesian economy through a comprehensive analytical approach. In identifying the role of cryptocurrency as either a chance or a threat to the Indonesian economy, this study encompasses several crucial dimensions. Firstly, the research will investigate the adoption and usage rates of cryptocurrency in Indonesia, along with the factors influencing them. Secondly, it will analyze cryptocurrency price volatility within the context of the Indonesian financial market, considering its correlation

and impact on traditional financial instruments such as stocks, bonds, and fiat currencies. Furthermore, this research will explore the implications of regulations and policies on cryptocurrency within the Indonesian context. Appropriate regulations can help mitigate risks and enhance security for cryptocurrency users. However, legal uncertainties and regulatory ambiguities may also hinder the growth of a healthy and innovative cryptocurrency ecosystem. This study employs library research and normative research methods, referencing relevant policies, regulations, and other legal materials. The methodology involves a qualitative approach with discourse analysis, analyzing literature and relevant regulations to understand and evaluate the application of laws in relevant contexts. The research will present in-depth findings on the impact of cryptocurrency on the stability of the Indonesian economy. It is hoped that the results of this study will provide valuable contributions to policymakers, financial practitioners, and academics in better understanding the dynamics of the digital currency market and formulating appropriate strategies to manage risks and leverage the economic growth potential inherent in the cryptocurrency phenomenon.

Keywords: *Cryptocurrency, Economic Stability, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Cryptocurrency adalah sebuah bentuk mata uang digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran melalui jaringan komputer yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti pemerintah atau bank untuk menjaga atau memelihara keberadaannya. Mata uang kripto ini menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan koin tambahan, dan memverifikasi transfer kepemilikan koin. Catatan kepemilikan koin individu disimpan dalam sebuah buku besar digital yang menggunakan kriptografi kuat untuk melindungi catatan transaksi, mengontrol penciptaan koin tambahan, dan memverifikasi transfer kepemilikan koin. Meskipun istilah ini digunakan untuk menggambarkan banyak token blockchain yang dapat dipertukarkan, cryptocurrency tidak dianggap sebagai mata uang dalam arti tradisional, dan berbagai perlakuan hukum telah diterapkan padanya di berbagai yurisdiksi, termasuk klasifikasi sebagai komoditas, sekuritas, dan mata uang. Umumnya, cryptocurrency dilihat sebagai kelas aset yang berbeda dalam praktiknya. Beberapa skema kripto menggunakan validator untuk menjaga cryptocurrency.

Dalam model proof-of-stake, pemilik menyetorkan token mereka sebagai jaminan dan sebagai imbalan, mereka mendapatkan otoritas atas token sesuai dengan jumlah yang mereka setorkan. Umumnya, pemilik token ini mendapatkan kepemilikan tambahan atas token dari waktu ke waktu melalui biaya jaringan, token yang baru dicetak, atau mekanisme imbalan lainnya. Cryptocurrency tidak berwujud dalam bentuk fisik (seperti uang kertas) dan biasanya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat. Cryptocurrency biasanya menggunakan kontrol terdesentralisasi sebagai lawan dari mata uang digital bank sentral. Ketika cryptocurrency diciptakan, dibuat sebelum diterbitkan, atau dikeluarkan oleh satu penerbit tunggal, umumnya dianggap terpusat. Ketika diimplementasikan dengan kontrol terdesentralisasi, setiap cryptocurrency bekerja melalui teknologi buku besar terdistribusi, biasanya blockchain, yang berfungsi sebagai database transaksi keuangan publik. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang dirilis sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun 2009. Pada Juni 2023, ada lebih dari 25.000 cryptocurrency lainnya di pasar, di antaranya lebih dari 40 memiliki kapitalisasi pasar melebihi \$1 miliar.

Kondisi cryptocurrency di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam mengembangkan ekosistem aset digital, termasuk cryptocurrency. Bappebti, sebagai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, telah menunjukkan nilai aset kripto Indonesia mencapai Rp 75,81 triliun dengan 17,67 juta pelanggan terdaftar per Juli 2023. Indonesia

juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi blockchain. Bappebti akan terus membuka diri terhadap perkembangan teknologi blockchain karena potensinya yang tidak hanya terbatas dari perdagangan aset kripto. Blockchain dapat dimanfaatkan di berbagai sektor seperti kesehatan, logistik, hingga telekomunikasi. Regulasi hukum di Indonesia dalam menangani penyalahgunaan cryptocurrency sudah cukup jelas pengaturannya. Peraturan yang menjamin kepastian hukum terkait keberadaan cryptocurrency, secara nasional telah diatur oleh BAPPEBTI, dalam Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 dan juga Peraturan BAPPEBTI No.11 Tahun 2022. Ditjen Aptika Kemkominfo siap mendukung pengembangan ekosistem blockchain di Indonesia. Berdasarkan Visi Indonesia Digital 2045, Artificial Intelligence (AI), Blockchain, IoT, Metaverse dan Quantum Computing merupakan 5 (lima) future technologies yang sebagian teknologi tersebut yang akan secara Teknologi dan peradaban kemanusiaan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan industri kripto & blockchain di Tokocrypto Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan signifikan. Di era digital yang terus berkembang, Indonesia telah menapakkan langkah signifikan dalam adopsi aset kripto dan teknologi blockchain. Aset kripto di Indonesia sendiri, aset kripto yang dimiliki oleh siapa pun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, jika Anda tertarik, investasi aset kripto masih tetap diperbolehkan untuk dilakukan. Hal tersebut dijelaskan melalui Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi mata uang kripto di Indonesia telah berkembang. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait cryptocurrency pada November 2021. Fatwa tersebut menyatakan bahwa cryptocurrency haram digunakan sebagai mata uang, komoditi, atau aset digital. Alasan MUI mengharamkan cryptocurrency adalah karena:

1. Gharar: Cryptocurrency memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena nilainya yang fluktuatif dan tidak memiliki aset dasar yang jelas.
2. Dharar: Cryptocurrency berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, seperti penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.
3. Qimar: Cryptocurrency diperjualbelikan dengan sistem judi, di mana terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Namun, MUI tidak melarang penggunaan cryptocurrency secara keseluruhan. MUI memperbolehkan cryptocurrency untuk digunakan sebagai:

1. Media pertukaran (barter) untuk komoditas lain yang halal dan jelas nilainya.
2. Hadiah dalam lomba atau kontes.
3. Sedekah.

MUI juga menekankan pentingnya regulasi yang ketat dari pemerintah untuk mengawasi perdagangan cryptocurrency dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian. Perlu dicatat bahwa fatwa MUI bersifat rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Umat Islam bebas untuk mengikuti fatwa tersebut atau tidak. Penting untuk diingat bahwa cryptocurrency adalah teknologi yang baru dan masih berkembang. Masih banyak perdebatan dan ketidakpastian tentang cryptocurrency, termasuk dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan riset yang mendalam sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency.

Regulasi, kebijakan, dan undang-undang mengenai cryptocurrency di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan. Bank Indonesia menyatakan bahwa cryptocurrency, seperti Bitcoin, bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian, cryptocurrency diakui sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Bank Indonesia juga melarang penyedia jasa pembayaran untuk menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan virtual currency (termasuk Bitcoin) dengan transaksi pembayaran. Selain itu, legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia masih belum jelas secara hukum, karena alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian, perkembangan cryptocurrency, terutama Bitcoin, terus signifikan, dengan Bank Indonesia mengidentifikasi adanya pedagang di Bali yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Indonesia masih bersikap abu-abu terhadap legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran, namun kemungkinan ke depannya cryptocurrency dapat menjadi alat pembayaran yang sah sepanjang memenuhi aspek yang baik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian melalui penelitian pustaka atau library research serta penelitian Normatif dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang terkait dengan substansi penelitian dan penerapan mengenai membaca, mendengar, memahami, dan mengkaji penerapan Undang Undang, Karya ilmiah, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis wacana. Penelitian dilakukan dengan menganalisis literatur dan dokumen lainnya yang relevan dengan tujuan memahami, mengevaluasi, dan menganalisis dalam konteks yang relevan dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency telah menarik perhatian yang signifikan di Indonesia, membentuk landscape keuangan dan menarik baik investor maupun penggemar. Negara ini telah mengalami peningkatan adopsi crypto, dipicu oleh berbagai faktor seperti minat investor muda dalam mencari peluang investasi yang menjanjikan di luar instrumen keuangan tradisional. Kemudahan akses ke cryptocurrency populer melalui platform yang menawarkan jasa perdagangan telah berkontribusi pada adopsi yang luas. Meskipun demikian, lingkungan regulasi untuk cryptocurrency di Indonesia masih dinamis dan topik diskusi yang terus berlangsung. Pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatur industri, berusaha mencapai keseimbangan antara kemajuan inovasi dan perlindungan konsumen. Kerangka regulasi ini sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada investor dan menjamin stabilitas pasar di sektor cryptocurrency. Beberapa startup Indonesia telah muncul untuk memenuhi permintaan yang tumbuh untuk jasa cryptocurrency, menawarkan berbagai jasa dari platform perdagangan cryptocurrency hingga dompet digital, membuatnya lebih mudah bagi pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan aset digital mereka. Namun, tantangan masih ada di ruang crypto. Volatilitas tetap menjadi perhatian, karena nilai cryptocurrency dapat berfluktuasi secara dramatis dalam jangka waktu yang singkat, menimbulkan risiko bagi investor dan menegaskan pentingnya kerangka regulasi yang kuat untuk mengurangi potensi kerugian. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk masa depan cryptocurrency di Indonesia. Seiring pasar berkembang, menjadi penting bagi pengguna untuk memahami

kompleksitas teknologi blockchain dan risiko investasi crypto. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan meningkatkan kesadaran tentang investasi yang bertanggung jawab dapat berkontribusi pada ekosistem crypto yang lebih sehat dan berkelanjutan.

1. Bagaimana Pemerintah Indonesia Mengatasi Pelanggaran Regulasi dan Kebijakan di Industri Crypto

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur industri cryptocurrency dengan serius. Dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara memajukan inovasi dan melindungi konsumen, pemerintah telah menerapkan kerangka regulatif yang penting untuk memberikan kejelasan kepada investor dan memastikan stabilitas pasar cryptocurrency di negara ini. Beberapa regulasi yang telah diterapkan termasuk Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 dan Peraturan BAPPEBTI No. 11 Tahun 2022 yang mengatur keberadaan cryptocurrency di Indonesia. Dalam menghadapi pelanggaran regulasi dan kebijakan di industri crypto, pemerintah Indonesia telah menunjukkan sikap tegas. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah berperan dalam mengawasi mata uang kripto yang ada dengan melakukan pemeriksaan khusus setidaknya sekali dalam setahun. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti ICCA (Indonesia Crypto Consumer Association), untuk membahas perlindungan konsumen dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap aset kripto. Pemerintah Indonesia juga menggunakan kombinasi dua pendekatan kebijakan dalam regulasi aset kripto, yaitu Pendekatan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dan Pendekatan Pembatasan. Kedua pendekatan tersebut mempunyai beberapa kekurangan dan menimbulkan arbitasi regulasi (regulatory arbitrage). Dalam upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap aset kripto, ICCA Blockchain Edufest 2022 telah diadakan, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap aset kripto, serta menjadi ajang promosi dan berkumpulnya para pelaku industri aset kripto di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah mengadakan beberapa inisiatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen dalam industri cryptocurrency. Contohnya, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengadakan "Indonesia Blockchain Week" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi blockchain dan cryptocurrency. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti International Organization of Securities Commissions (IOSCO) untuk meningkatkan standar regulasi dan perlindungan konsumen dalam industri cryptocurrency.

Dalam kesimpulan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang serius untuk mengatur industri cryptocurrency, dengan menggunakan kombinasi dua pendekatan kebijakan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dalam menangani pelanggaran regulasi dan kebijakan di industri cryptocurrency untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi para pelaku pasar dan investor.

2. Apa Dampak Volatilitas Harga Cryptocurrency Terhadap Kestabilan Pasar Keuangan Indonesia, Termasuk Pasar Saham dan Obligasi?

Perkembangan dan adopsi cryptocurrency telah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter di Indonesia. Faktor makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan tingkat pengangguran menjadi pendorong penting pasar kripto. Suku bunga, misalnya, dapat mempengaruhi biaya penggunaan kredit dan, sebagai hasilnya, dapat mempengaruhi permintaan cryptocurrency. Inflasi, sebaliknya, dapat mempengaruhi nilai tukar dan, oleh karena itu, dapat mempengaruhi harga saham dan obligasi. Volatilitas harga cryptocurrency, seperti Bitcoin, dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter. Fluktuasi harga

cryptocurrency dapat mempengaruhi harga saham dan obligasi, serta dapat mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, volatilitas harga cryptocurrency dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter. Cryptocurrency, seperti Bitcoin, telah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pasar saham di Indonesia. Penelitian telah menunjukkan bahwa cryptocurrency berpengaruh positif terhadap harga saham, terutama pada sektor pertambangan, pertanian, industri kimia dasar, dan aneka. Oleh karena itu, cryptocurrency dapat menjadi alat investasi yang efektif untuk meningkatkan keuntungan. Cryptocurrency juga telah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pasar obligasi di Indonesia. Penelitian telah menunjukkan bahwa cryptocurrency berpengaruh positif terhadap harga obligasi, terutama pada sektor pertambangan, pertanian, industri kimia dasar, dan aneka. Oleh karena itu, cryptocurrency dapat menjadi alat investasi yang efektif untuk meningkatkan keuntungan. Perkembangan dan adopsi cryptocurrency di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter. Faktor makroekonomi, volatilitas harga cryptocurrency, pengaruh terhadap pasar saham, dan pengaruh terhadap obligasi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak dari cryptocurrency dalam merumuskan kebijakan moneter yang sesuai dengan perkembangan teknologi finansial global.

Bagaimana Cryptocurrency Dapat Membantu Perekonomian Indonesia?

Penggunaan cryptocurrency di Indonesia memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu perekonomian negara. Berikut beberapa contoh keuntungan tersebut:

1. Pengenaan Pajak: Pemerintah Indonesia telah menetapkan aset kripto sebagai objek pajak dan dikenakan pajak PPN dan PPh. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia.
2. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Cryptocurrency memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berinvestasi dalam cryptocurrency, hal ini dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia[.
3. Inovasi Infrastruktur Keuangan: Cryptocurrency dapat menjadi inovasi dalam pengembangan infrastruktur keuangan digital di era modern. Dengan melibatkan cryptocurrency dalam sistem keuangan, dapat memperkuat ekosistem keuangan dan memudahkan akses, keamanan, serta stabilitas sistem keuangan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Regulasi dan Pengawasan: Regulasi yang ketat terkait dengan penggunaan cryptocurrency dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat pengawasan terhadap mata uang digital ini. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengatur regulasi terkait cryptocurrency, yang dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memberikan arah yang jelas bagi perkembangan cryptocurrency di Indonesia.

Cryptocurrency dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional, seperti rekening bank. Hal ini dapat mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah. Transaksi cryptocurrency umumnya lebih cepat, murah, dan transparan dibandingkan dengan transaksi keuangan tradisional. Hal ini dapat menguntungkan bisnis dan konsumen, serta mendorong perdagangan internasional. Industri cryptocurrency menciptakan lapangan pekerjaan baru di berbagai bidang, seperti pengembangan teknologi, programming, dan pemasaran. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency memiliki potensi untuk

merevolusi berbagai sektor ekonomi, seperti keuangan, logistik, dan rantai pasokan. cryptocurrency di Indonesia termasuk platform seperti Loker Marketplace dan Pintu yang membantu UMKM menerima pembayaran online dengan mudah dan murah, fintech berbasis blockchain seperti Xendit dan KoinWorks yang meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat unbanked dan underbanked, dan penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasokan, seperti dalam industri kelapa sawit.

Dengan demikian, penggunaan cryptocurrency di Indonesia tidak hanya memberikan peluang investasi yang menarik, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara melalui pengenaan pajak, investasi, inovasi infrastruktur keuangan, dan regulasi yang ketat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan regulasi dari lembaga – lembaga terkait serta literature yang relevan peran dan pengaruh cryptocurrency terhadap perekonomian Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency telah memainkan peran yang semakin penting dalam landscape keuangan Indonesia, menarik minat investor dan penggemar serta memicu adopsi yang pesat. Meskipun demikian, tantangan dalam hal regulasi, volatilitas, dan literasi tetap ada. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah serius dalam mengatur industri cryptocurrency dengan kerangka regulatif yang bertujuan memberikan kejelasan kepada investor dan melindungi konsumen. Regulasi seperti Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 dan Peraturan BAPPEBTI No. 11 Tahun 2022 telah diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menghadapi pelanggaran regulasi, pemerintah telah menunjukkan sikap tegas melalui pengawasan rutin dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti ICCA. Peningkatan literasi melalui acara seperti ICCA Blockchain Edufest 2022 juga menjadi fokus untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi industri cryptocurrency. Volatilitas harga cryptocurrency mempengaruhi stabilitas pasar keuangan Indonesia, termasuk pasar saham dan obligasi. Namun, cryptocurrency juga telah memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan keuntungan bagi sektor-sektor tertentu. Secara keseluruhan, cryptocurrency memiliki potensi untuk membantu perekonomian Indonesia melalui pengenaan pajak, investasi, inovasi infrastruktur keuangan, dan regulasi yang ketat. Dengan pendekatan yang cermat dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, cryptocurrency dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun cryptocurrency memiliki potensi manfaat yang signifikan, penting untuk diingat bahwa cryptocurrency masih merupakan teknologi yang baru berkembang dan memiliki risiko yang terkait. Investasi dalam cryptocurrency berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan semua uang Anda. Sebaiknya hanya berinvestasi dengan uang yang Anda rela kehilangan. Penting juga untuk mengikuti perkembangan terbaru tentang regulasi cryptocurrency di Indonesia dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Djari, Y. R. (2021). Day Of The Week Effect Dan Volatilitas Cryptocurrency Pada Masa Pandemi Covid-19. *Financial Review*. *Financial Review*, 1-17.
- Handayani, R. (2023, August). Ini Perbedaan Penerapan Pajak Kripto di Indonesia dan AS. Retrieved from Pajak.com: <https://www.pajak.com>
- Hidayah, A. L. (2023, April 11). Yuk, Berkenalan dengan Kripto! Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>
- Huda, N. &. (2020). Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Manaj. Dan*

- Bisnis, 72-84.
- Indonesia, A. (2021, June 4). Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya. Retrieved from Allianz: <https://www.allianz.co.id>
- Kurniawan, H. (2021, October 21). Bagaimana Kebijakan Regulasi Mata Uang Kripto yang Tepat. Retrieved from Consumer Choice Center: <https://consumerchoicecenter.org>
- Oktavira, B. A. (2021, December 29). Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com>
- Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan. *Jurnal Serambi Hukum*, 96-101.
- Syaddad, A. (2023, August 31). RI Disebut Punya Potensi Pimpin Pengembangan Blockchain, Ini Sebabnya. Retrieved from detikfinance: <https://finance.detik.com>